



RENJA 2026

Rencana Kerja

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Ciremai No.1 Perumahan karang Indah Karawang



www.dppkb.karawangkab.go.id



@dppkbkarawang



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kasih sayang-NYA sehingga Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2026 dapat tersusun. Atas Kerjasama dan sinergitas yang baik antar pegawai sehingga penyusunan Rencana Kerja dapat selesai tepat waktu.

Dokumen Renja merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan yang ada terutama di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. Kualitas dokumen Rencana Kerja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Rencana Kerja sangat ditentukan oleh kemampuan Dinas dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat daerah.

Rencana Kerja Dinas mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Rencana Kerja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama– sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan bekerja sama dengan baik dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) ini. Semoga dapat bermanfaat.

Karawang, 27 Agustus 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KARAWANG
H. SOFIAN S.H
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196508201986032010



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	26
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	29
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	51
BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	53
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	54
3.3 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	55
BAB IV Rencana Kerja dan Pendaan Perangkat Daerah	
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	75
BAB V Penutup	80

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPPKB dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	10
Tabel 2.1.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	22
Tabel 2.2.1	Pencapaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	25
Tabel 2.4.1	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026	30
Tabel 2.5.1	Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026	52
Tabel 3.3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027	57

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1	Keterkaitan Dokumen Renja dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.....	3
Gambar 1.2	Keterkaitan Antara Dokumen Renja Dengan dokumen lainnya	4
Gambar 2.1.1	Keterkaitan RPJMD, Renstra dan Renja	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjabarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka menengah ke dalam program dan kegiatan tahunan yang operasional, terukur, dan realistis. Dokumen ini menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga.

Penyusunan Renja DPPKB Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Bupati Karawang Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karawang Tahun 2026, yang menjadi rujukan utama perencanaan seluruh perangkat daerah. Selain itu, proses penyusunan Renja juga berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, dan Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Di samping itu, Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tetap dijadikan rujukan normatif dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Dokumen Renja disusun melalui serangkaian proses yang sistematis, dimulai dari tahap persiapan, tahap penyusunan rancangan, hingga tahap penetapan dokumen akhir. Pada tahap persiapan, dilakukan pembentukan tim penyusun, penyusunan agenda kerja, serta pengumpulan data dan informasi yang diperlukan. Tahap penyusunan rancangan dilakukan secara paralel dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Karawang, dengan fokus pada evaluasi capaian Renja tahun sebelumnya, pengkajian terhadap kondisi aktual, serta pencermatan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah.

Renja DPPKB juga disusun dengan merujuk pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) DPPKB Kabupaten Karawang Tahun 2021–2026, yang menjadi pedoman lima tahunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Melalui Renja ini, DPPKB merumuskan prioritas program dan kegiatan tahun 2026 yang mendukung tercapainya tujuan RPJMD Kabupaten Karawang, serta sejalan dengan target pembangunan nasional dalam bidang kependudukan dan keluarga.

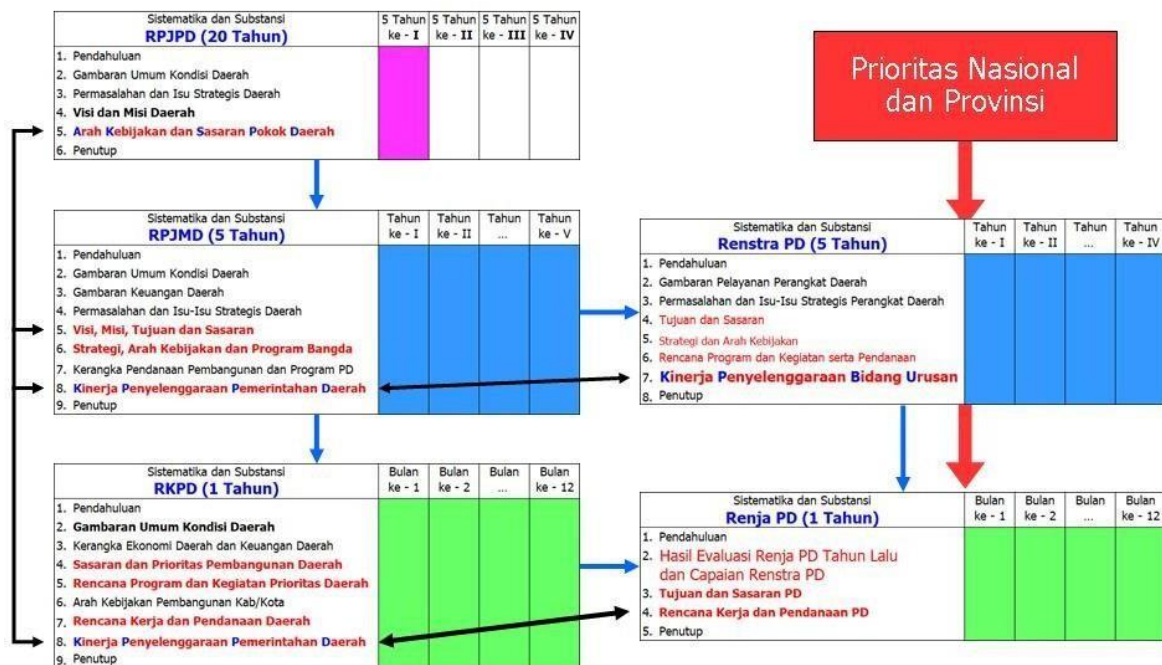
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan daerah, khususnya dalam:

- Mewujudkan pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana yang inklusif dan berkualitas;
- Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui edukasi, pemberdayaan, dan pelayanan berbasis data;
- Mendukung pencapaian pembangunan berwawasan kependudukan, yaitu pembangunan yang menjadikan penduduk sebagai titik sentral dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan.

Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bahwa pembangunan harus memperhatikan aspek kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Renja DPPKB berfungsi sebagai instrumen sinkronisasi antara perencanaan strategis jangka menengah (Renstra dan RPJMD) dengan perencanaan dan penganggaran tahunan (RAPBD), sekaligus menjadi alat akuntabilitas pelaksanaan kinerja tahunan perangkat daerah. Oleh karena itu, penyusunan Renja harus dilakukan secara partisipatif, berbasis data, berorientasi pada hasil, serta sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Gambar 1.1
Keterkaitan Dokumen Renja dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan, lokasi pelaksanaan, serta kelompok sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan kebutuhan pendanaan, sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Penyusunan Renja dilakukan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah dan menjadi bagian integral dari proses perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Karawang Nomor 36 Tahun 2025, serta dilaksanakan melalui langkah-langkah berikut:

1. Tahap Persiapan, yang mencakup pembentukan tim penyusun Renja perangkat daerah, penyusunan agenda kerja, dan pengumpulan data serta informasi pendukung.

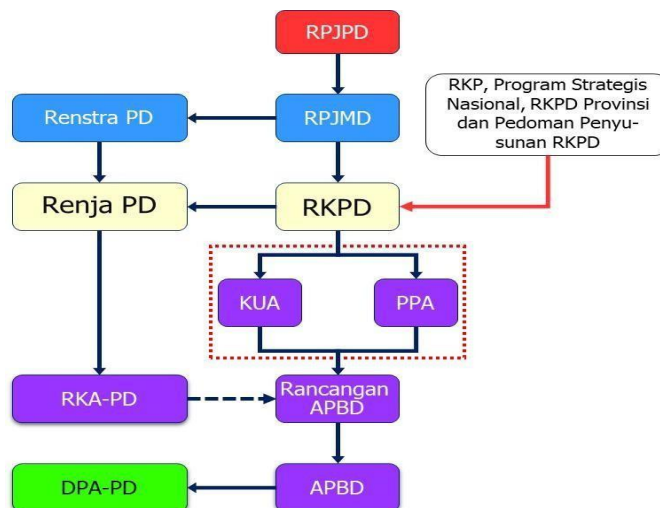
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja, dilakukan dengan berpedoman pada dokumen Renstra perangkat daerah, hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya (tahun $n-2$), serta evaluasi capaian Renja tahun berjalan (tahun $n-1$), guna menilai efektivitas program dan kegiatan sebelumnya.
3. Penyusunan Rancangan Renja, disusun berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja perangkat daerah serta mengacu pada arah kebijakan Rancangan Awal RKPD. Pada tahap ini, perangkat daerah melakukan sinkronisasi antara usulan program dan kegiatan dengan kerangka prioritas pembangunan daerah.
4. Pembahasan Rancangan Renja dilakukan dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, sebagai media partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Forum ini bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman indikator kinerja, sasaran, program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja, dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD yang telah ditetapkan. Rancangan ini mencerminkan hasil penajaman dan penyelarasan program dan kegiatan sesuai prioritas pembangunan daerah.
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja, dilakukan oleh Bappeda dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah, untuk selanjutnya disampaikan kepada Bappeda paling lambat satu minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Perumusan program, kegiatan, dan penganggaran dalam dokumen Renja difokuskan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta pencapaian sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Renstra DPPKB Kabupaten Karawang Tahun 2021–2026.

Penyusunan Renja juga didasarkan pada hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), baik dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, maupun kabupaten. Selain itu, Renja disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya yang telah dirangkum dalam dokumen RKPD Kabupaten.

Dengan demikian, penyusunan Renja DPPKB Tahun 2026 secara substansi diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2026, serta memastikan sinergi dengan program prioritas pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan kependudukan.

Keterkaitan antara dokumen Renja dengan dokumen yang lainnya adalah seperti yang di tunjukkan pada gambar 1.2



1.2 Landasan Hukum

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional : Mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional yang terintegrasi antara pusat dan daerah, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga : Mengatur kebijakan dan strategi nasional dalam pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk serta pembangunan keluarga melalui program Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga sejahtera.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kesejahteraan, pengasuhan, perlindungan, serta jaminan kebutuhan dasar baik secara fisik, mental, maupun sosial.
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Merupakan perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002. Mengatur tentang hak anak, kewajiban negara dan masyarakat dalam perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran.
6. Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Menyediakan standar baku untuk klasifikasi program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan daerah serta menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
7. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 Merupakan pembaruan terhadap kodefikasi dan nomenklatur yang digunakan dalam perencanaan dan penganggaran, khususnya dalam mendukung sistem informasi pemerintahan daerah berbasis elektronik (SIPD).

8. Peraturan Bupati Karawang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penetapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 Menetapkan rencana strategis lima tahunan bagi setiap perangkat daerah di Kabupaten Karawang sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 65 Tahun 2021 dan Perubahannya (Perbup No. 426 Tahun 2023) tentang Kedudukan dan Tata Kerja DPPKB Mengatur struktur organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang.
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang RPJP Provinsi Jabar 2005–2025 Menetapkan arah pembangunan jangka panjang daerah selama 20 tahun untuk mewujudkan visi pembangunan Provinsi Jawa Barat yang berkelanjutan dan berdaya saing.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Mengatur pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi perangkat daerah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang efisien dan efektif.
12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 36 Tahun 2025 tentang RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2026 Merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi penjabaran dari RPJMD Kabupaten Karawang dan Renstra perangkat daerah untuk tahun 2026.
13. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Mengatur prosedur dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah, mulai dari RPJPD, RPJMD, hingga RKPD, serta pelaksanaan dan evaluasi pembangunan berbasis kinerja.
14. Peraturan Bupati Karawang Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang Tahun 2026 dimaksudkan untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2021–2026. Renja disusun sebagai pedoman operasional bagi seluruh pelaksanaan program dan kegiatan tahunan, serta sebagai dasar dalam upaya pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah dirumuskan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang bersifat operasional, terarah, dan terukur sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- b. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, guna memastikan ketercapaian target tahunan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas dan RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2026;
- c. Berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2026.
- d. Sebagai Pedoman penyusunan kegiatan dalam mendukung capaian indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Dinas Pengendalian penduduk dan KB;
- e. Sebagai Pedoman Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dalam menentukan kegiatan strategis sesuai dengan isu isu dan permasalahan yang menjadi tanggungjawab dinas.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2026 antara lain memuat:

BAB I	Pendahuluan
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPKB Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
	2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
	3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
	3.3. Program dan Kegiatan Prioritas
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
BAB V	: Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPKB Tahun 2024 dan Capaian Renstra

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu 2024 dan perkiraan Capaian Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 65 Tahun 2021 Serta Peraturan Bupati Nomor 426 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021, bahwa Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga berencana mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam mendukung Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2021 – 2026, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkomitmen atas Visi, Misi dengan tujuan dan sasarannya dapat di lihat pada Gambar 2.1.1

Gambar 2.1.1 Keterkaitan, RPJMD, Renstra dan Renja



Tabel 2.1.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPPKB dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Karawang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target Realisasi Kinerja Program dan Keluaran SKPD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra s/d Tahun 2025	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.14.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terlaksana	100	100	100	100	100	100	100	100
2.14.01.2.01	Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Program Perencanaan, Penganggaran,	100	100	100	100	100	100	100	100

		dan Evaluasi Kinerja PD								
2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100
2.14.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Dokumen hasil sinkronisasi dan harmonisasi pusat dan daerah	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	3 dokumen	100
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai ASN DPPKB	23	23	23	23	100	23	23	310
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang dibayarkan gaji serta tunjangannya	23	23	23	23	100	23	23	100
2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	100	6 laporan	6 laporan	100
2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi BMD Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100	2 laporan	6 laporan	100

2.14.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Administrasi BMD Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100	2 laporan	6 laporan	100
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100	2 laporan	6 laporan	100
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	12 Paket	100

2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100	4 laporan	12 laporan	300
2.14.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Perlengkapan rumah tangga	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100	4 laporan	12 laporan	300
2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan logistic kantor	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100	4 laporan	12 laporan	300
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	36 dokumen	300
2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	36 dokumen	300
2.14.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah dokumen laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	36 dokumen	300
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	36 dokumen	300

		dan Konsultasi Perangkat Daerah								
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan BMD Perangkat Daerah	1 Unit	0	1 Unit	1 Unit	100	0	1 Unit	100
2.14.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah laporan Pengadaan Mebel	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100
2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan Pengadaan Peralatan dan Mesin	3 Unit	3 Unit	4 Unit	4 Unit	100	4 Unit	4 Unit	100
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan tagihan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
2.14.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Pembayaran Jasa Tenaga Harian	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100

		Lepas Perangkat Daerah								
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan BMD Perangkat daerah	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah laporan pemeliharaan kendaraan dinas dan pembayaran pajak kendaraan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100	3 laporan	3 laporan	100
2.14.01.2.09.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah laporan pemeliharaan Gedung perangkat daerah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	8 laporan	10 laporan	100

2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah Pemangku kebijakan yang terlibat dalam Program pengendalian penduduk	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	100	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	100
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen kebijakan yang tersinkronisasi dalam mendukung Pengendalian Kuantitas Penduduk	1 dokumen	0	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100

2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Jumlah laporan rapat pengendalian program Bangsa Kencana	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100	3 laporan	3 laporan	100
2.14.02.2.01.0033	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyediaan dan pengembangan Materi Pendidikan dengan isu lokal	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100	3 laporan	3 laporan	100
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan pengendalian penduduk	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah laporan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
2.14.02.2.02.0023	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan,	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100

	Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga	Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga								
2.14.03	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Jumlah Akseptor yang dilayani KB	5200 Akseptor	4653 Akseptor	5200 Akseptor	5200 Akseptor	100	5603 Akseptor	5603 Akseptor	100
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah laporan hasil advokasi dan KIE	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Jumlah laporan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah laporan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcem), Rapat Koordinasi Desa	Jumlah laporan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100

	(Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)								
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah laporan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah laporan Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100

2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Petugas Lapangan KB	618 Petugas	618 Petugas	618 Petugas	618 Petugas	100	618 Petugas	618 petugas	100
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader IMP	618 Petugas	618 Petugas	618 Petugas	618 Petugas	100	618 Petugas	618 petugas	100
2.14.03.2.02.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Penyuluh KB	116 Penyuluh KB	116 Penyuluh KB	116 Penyuluh KB	116 Penyuluh KB	100	116 Penyuluh KB	116 Penyuluh KB	100
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Fasyankes yang mendapatkan distribusi alokon	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas	Jumlah laporan Fasyankes yang mendapatkan distribusi alokon	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100

	Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya									
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Akseptor yang dilayani KB	5200 Akseptor	4653 Akseptor	5200 Akseptor	5200 Akseptor	100	5603 Akseptor	5603 Akseptor	100
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan pembinaan stakeholder terkait Program KB	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan oleh organisasi masyarakat	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100	5 Laporan	5 laporan	100
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah laporan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	10 laporan	10 laporan	10 laporan	10 laporan	100	10 laporan	10 laporan	100

2.14.03.2.04.0007	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah laporan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	10 laporan	10 laporan	10 laporan	10 laporan	100	10 laporan	10 laporan	100
-------------------	---	--	------------	------------	------------	------------	-----	------------	------------	-----

2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatkan Median usia kawin pertama Wanita	20,81	21,8	21,82	21,82	100	22	22	100
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan kegiatan pembinaan keluarga	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah laporan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100

		(UPPKA))								
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK.R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah pengadaan BKB Kit stunting	5 buah	5 buah	5 buah	5 buah	100	10 buah	10 laporan	100
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah laporan pembinaan Poktan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100

2.14.04.2.01.0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100	2 laporan	2 laporan	100
2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Tim pendamping keluarga yang mendapatkan dukungan operasional data	5637 Orang	5637 Orang	5637 Orang	5637 Orang	100	5637 Orang	5637 Orang	100
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kegiatan kemitraan Tingkat Kabupaten	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100	2 laporan	2 laporan	100

	dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga									
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah laporan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100	2 laporan	2 laporan	100
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah laporan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100	2 laporan	2 laporan	100
2.14.04.2.02.0007	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100	2 laporan	2 laporan	100

		Program Pembangunan Keluarga								
2.14.04.2.02.0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah laporan kegiatan kemitraan Tingkat Kabupaten	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100	2 laporan	2 laporan	100

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa capaian target dan realisasi program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) mencapai 100 persen. Pencapaian ini tercermin dalam penyajian data pada Tabel 2.1.1, yang menunjukkan bahwa seluruh indikator kinerja program berhasil direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan program tersebut tidak lepas dari sejumlah faktor pendukung, antara lain:

1. Terjalannya kerja sama yang baik antara DPPKB dengan perangkat daerah lainnya,
2. Kolaborasi aktif dengan organisasi kemasyarakatan,
3. Kemitraan yang solid dengan pihak lintas sektor,
4. Serta partisipasi masyarakat yang tinggi dalam mendukung pelaksanaan program.

2.1.2. Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Yang lalu

Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang nomor 48 Tahun 2021 tentang penetapan indikator kinerja utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, maka Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada table 2.1.2

Tabel 2.1.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Sasaran RPJMD	Sasaran Renstra	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Bidang Kesehatan	Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	1,2	1,16	103 %
2		Menurunkan Angka Kelahiran pada PUS	Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS usia 15 – 49 Tahun	2,0	2,01	99 %
3		Meningkatkan Median Usia Kawin Wanita	Usia Pertama Wanita usia 15-49 tahun menikah	20,8	21,8	104 %

Sumber : infografik Kinerja Utama Bangsa Kencana BKKBN Pusat, Hasil Pemutakhiran PK-24

Perhitungan Indikator Kinerja Utama DPPKB

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK 2024				
NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK 2023	JUMLAH PENDUDUK 2024	PERSENTASE LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK 2023-2024
1	010 PANGKALAN	42000	42.747	1,779
2	011 TEGALWARU	40000	40.709	1,773
3	020 CIAMPEL	45000	45.784	1,742
4	031 TELUKJAMBE TIMUR	135000	135.745	0,552
5	032 TELUKJAMBE BARAT	57000	57.844	1,481
6	040 KLARI	208000	212.462	2,145
7	050 CIKAMPEK	123000	123.883	0,718
8	051 PURWASARI	85000	86.946	2,289
9	060 TIRTAMULYA	52000	52.104	0,200
10	070 JATISARI	83000	83.638	0,769
11	071 BANYUSARI	58000	58.031	0,053
12	072 KOTABARU	142000	143.941	1,367
13	081 CILAMAYA WETAN	82000	81.986	-0,017
14	082 CILAMAYA KULON	68000	68.196	0,288
15	090 LEMAHABANG	68000	68.043	0,063
16	100 TELAGASARI	71000	72.010	1,423

17	111 MAJALAYA	84000	87.981	4,739
18	112 KARAWANG TIMUR	163000	166.506	2,151
19	113 KARAWANG BARAT	167000	167.431	0,258
20	120 RAWAMERTA	56000	56.057	0,102
21	130 TEMPURAN	67000	67.301	0,449
22	140 KUTAWALUYA	63000	63.130	0,206
23	150 RENGASDENGKLOK	119000	120.116	0,938
24	151 JAYAKERTA	69000	69.953	1,381
25	160 PEDES	81000	82.060	1,309
26	161 CILEBAR	46000	46.910	1,978
27	170 CIBUAYA	55000	54.987	-0,024
28	180 TIRTAJAYA	72000	72.909	1,263
29	190 BATUJAYA	82000	82.741	0,904
30	200 PAKISJAYA	42000	42.233	0,555
		2525000	2.554.384	1,164

Rumus Perhitungan Laju Pertumbuhan Penduduk :

$$LPP = \left(\frac{P_t - P_0}{P_0} \right) \times 100\%$$

atau dalam bentuk tahunan:

$$LPP = \left(\left(\frac{P_t}{P_0} \right)^{\frac{1}{t}} - 1 \right) \times 100\%$$

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Karawang = 1,16%

2. Total Fertility Rate

Rumus Perhitungan TFR :

Perhitungan : TFR

ASFR x 5 (interval kelompok umur)

1000

$$\text{TFR Karawang} = \frac{27.5 + 93.1 + 112.7 + 93.5 + 54.7 + 19.3 + 2.9 \times 5}{1000}$$

$$= \frac{403,8 \times 5}{1000}$$

$$= 2019 : 1000$$

$$= 2.01$$

3. Median Usia Kawin Pertama Wanita

Rumus Median Usia Kawin Pertama Wanita

$$\text{Median} = L + \left(\frac{\frac{N}{2} - F}{f} \right) \times i$$

Berdasarkan hasil Pemutakhiran Data Keluarga Tahun 2024 yang dihimpun oleh BKKBN Pusat, median usia kawin pertama wanita di Kabupaten Karawang tercatat sebesar **21,8 tahun**. Angka ini menunjukkan bahwa setengah dari jumlah wanita yang menikah di wilayah tersebut melakukan pernikahan pertamanya pada usia di bawah atau sama dengan 21,8 tahun.

Capaian ini menjadi indikator penting dalam menilai dinamika sosial dan pembangunan kependudukan di Kabupaten Karawang, khususnya terkait dengan ketahanan keluarga, kesiapan reproduksi, serta akses terhadap pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan. Semakin tinggi median usia kawin pertama, umumnya dikaitkan dengan peningkatan partisipasi pendidikan, penguatan peran perempuan dalam pembangunan, dan penurunan risiko kehamilan pada usia muda yang dapat berdampak terhadap kesehatan ibu dan anak.

Angka 21,8 tahun tersebut mencerminkan masih adanya tantangan dalam upaya penundaan usia perkawinan di Kabupaten Karawang. Oleh karena itu, diperlukan strategi intervensi yang lebih komprehensif melalui pendekatan edukatif, advokasi kebijakan, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung program pembangunan keluarga berencana dan perlindungan anak.

Indikator Kinerja Utama DPPKB

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan kependudukan dan keluarga berencana di Kabupaten Karawang, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja utama (IKU) yang selama ini digunakan untuk mengukur capaian kinerja instansi.

Sebelumnya, IKU DPPKB mencakup:

1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
2. Median Usia Kawin Pertama Wanita
3. Total Fertility Rate (TFR) atau Angka Kelahiran Total

Ketiga indikator tersebut selama ini telah menunjukkan capaian yang sangat baik di Kabupaten Karawang. Berdasarkan data Pemutakhiran Keluarga Tahun 2024 yang dihimpun oleh BKKBN, nilai-nilai dari ketiga indikator tersebut sudah berada pada batas aman dan stabil. Oleh karena itu, meskipun tetap harus dilakukan pemantauan dan pemeliharaan (maintenance) secara berkala agar tidak terjadi penurunan yang signifikan, indikator tersebut tidak lagi dijadikan prioritas dalam IKU saat ini.

Sebagai langkah strategis dan responsif terhadap tantangan di lapangan, maka DPPKB Kabupaten Karawang menetapkan tiga indikator baru sebagai Indikator Kinerja Utama yang lebih relevan terhadap kondisi aktual dan menuntut intervensi lebih intensif. Ketiga indikator tersebut adalah:

1. MCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate)

Definisi: Persentase pasangan usia subur (PUS) yang saat ini menggunakan metode kontrasepsi modern terhadap seluruh PUS.

Rumus perhitungan:

$$\text{MCPR} = \left(\frac{\text{Jumlah PUS yang menggunakan alat/cara KB modern}}{\text{Jumlah seluruh PUS}} \right) \times 100\%$$

Alasan pemilihan: Capaian MCPR di Kabupaten Karawang masih tergolong rendah dan belum memenuhi target nasional. Rendahnya angka MCPR dapat berdampak pada meningkatnya risiko kehamilan yang tidak diinginkan, yang selanjutnya dapat memengaruhi laju kelahiran dan kualitas hidup keluarga. Oleh karena itu, perlu strategi khusus dalam peningkatan akses, edukasi, dan pelayanan KB modern.

2. Unmet Need

Definisi: Persentase PUS yang ingin menunda atau menghentikan kehamilan, tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi apa pun.

Rumus perhitungan:

$$\text{Unmet Need} = \left(\frac{\text{Jumlah PUS yang tidak memakai KB namun ingin menunda/menghentikan kehamilan}}{\text{Jumlah seluruh PUS}} \right) \times 100\%$$

Alasan pemilihan: Tingginya angka unmet need mencerminkan adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan layanan KB. Kondisi ini dapat terjadi karena kurangnya informasi, stigma, hambatan geografis, ataupun keterbatasan akses layanan. Menurunkan angka unmet need menjadi target strategis karena erat kaitannya dengan pengendalian jumlah dan kualitas penduduk.

3. Jumlah Kampung KB yang Berkelanjutan

Definisi: Jumlah kampung KB aktif yang mampu menjalankan delapan fungsi keluarga, mengintegrasikan berbagai sektor (lintas OPD), dan menunjukkan keberlanjutan program pembangunan keluarga.

Kriteria kampung KB berkelanjutan antara lain:

- Memiliki data keluarga yang mutakhir
- Memiliki rencana kegiatan tahunan
- Aktif dalam pelaksanaan kegiatan terpadu lintas sektor
- Adanya kader dan fasilitator yang aktif
- Mampu melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan

Rumus penilaian (indikatif):

$$\text{Jumlah Kampung KB Berkelanjutan} = \text{Jumlah Kampung KB Aktif dan Memenuhi Kriteria Minimal Keberlanjutan}$$

Alasan pemilihan: Kampung KB merupakan model pendekatan pembangunan keluarga berbasis wilayah. Namun dalam praktiknya, banyak Kampung KB yang masih bersifat simbolis atau tidak aktif. Dengan menjadikan indikator ini sebagai IKU, diharapkan terjadi peningkatan kualitas, kemandirian, dan keberlanjutan Kampung KB sebagai pusat edukasi dan pelayanan pembangunan keluarga.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian indikator strategis

berada pada kategori **tinggi**. Hal ini ditunjukkan oleh realisasi tiga indikator utama yang telah mendekati atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, yaitu Renstra dan RPJMD.

Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Laju Pertumbuhan penduduk dapat digunakan untuk memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang. Tingginya pertumbuhan penduduk di suatu wilayah merupakan salah satu faktor yang bisa menyebabkan banyak permasalahan apabila penduduk tersebut tidak dikelola dengan oleh pemerintah setempat. Masalah yang akan timbul akibat tingginya jumlah penduduk diantaranya :

- a. Tingkat Pengangguran yang tinggi;
- b. Kesejahteraan social menurun;
- c. Kriminalitas meningkat;
- d. Pemukiman yang padat dan kumuh;
- e. Sampah yang tidak terkendali;
- f. Pendidikan yang tidak merata.

Indikator pertama yaitu persentase laju pertumbuhan penduduk, menunjukkan capaian sebesar 1,16% dari target 1,2%, atau sebesar 103%. Hal ini mengindikasikan bahwa program pengendalian jumlah penduduk yang dilakukan oleh DPPKB telah berhasil menekan angka pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karawang. Keberhasilan ini tidak terlepas dari pelaksanaan program Keluarga Berencana yang masif, serta dukungan dari berbagai pihak, seperti tenaga lini lapangan, kader KB, serta kerja sama dengan sektor lain dan masyarakat.

4. Angka kelahiran total atau total fertility rate (TFR) yakni rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita sampai dengan akhir masa reproduksinya angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per wanita usia subur, capaian realisasi tercatat sebesar 2,01 dari target 2,0 atau sebesar 99%. Meskipun tidak mencapai 100%, hasil ini tetap menunjukkan bahwa angka kelahiran di Kabupaten Karawang sudah sangat mendekati *replacement level fertility* yang ideal, yaitu dua anak per wanita. Artinya, upaya pengendalian kelahiran sudah berada pada jalur yang benar. Namun, capaian ini juga memberikan catatan bahwa masih perlu dilakukan penguatan edukasi kepada masyarakat, peningkatan akses alat/cara kontrasepsi modern, serta penanganan terhadap unmet need yang mungkin masih terjadi.
5. Median Usia Kawin Pertama Wanita adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama wanita. Indikator ketiga yang berfokus pada **usia pertama kali menikah bagi perempuan usia 15–49 tahun**, menunjukkan capaian yang menggembirakan. Target yang ditetapkan sebesar 20,8 tahun berhasil dilampaui dengan capaian 21,8 tahun atau 104%. Ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran di masyarakat mengenai pentingnya usia matang dalam memasuki pernikahan, yang erat kaitannya dengan kesiapan reproduksi, psikologis, serta ekonomi. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang dilakukan DPPKB, termasuk kampanye pencegahan perkawinan anak dan pendampingan remaja melalui program Generasi Berencana (Genre).

Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2			3	4	5	6	8	9	10	11	12
1	Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)		v	70%	72%	73%	65%	68,65%	64%	64,5	65%	
2	Total Fertility Rate (TFR)		v	2,05	2,01	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
3	Unmet Need (Pengguna Kontrasepsi yang tidak terlayani)		v	11,75 %	13%	12,5%	12 %	11,75%	13%	12,5%	12%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, maka pelaksanaan percepatan penurunan stunting dilimpahkan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan Keluarga Berencana di tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan regulasi tersebut, DPPKB Kabupaten Karawang tidak hanya menjalankan tugas di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tetapi juga memiliki peran penting dan aktif dalam mendukung upaya percepatan penurunan stunting.

1. Gambaran Layanan Perangkat Daerah

a. Capaian kinerja DPPKB menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan tiga indikator kinerja utama Kepala Dinas, yaitu:

- Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk
- Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)
- Median Usia Kawin Pertama Wanita

Ketiganya telah berhasil mencapai target sesuai yang ditetapkan dalam Renstra dan RPJMD.

b. Selain itu, tiga indikator kinerja kunci dalam urusan Pengendalian Penduduk dan KB juga menunjukkan pencapaian optimal:

- TFR telah mencapai target.
- Persentase penggunaan kontrasepsi modern (mCPR) mencapai 91,74%.
- Persentase kebutuhan ber-KB yang terpenuhi (unmet need) tercapai sebesar 96,15%.

Pencapaian ini menunjukkan keberhasilan DPPKB dalam menjalankan fungsi teknis maupun strategis dalam pengendalian penduduk, pelayanan KB, serta advokasi kepada masyarakat.

2. Permasalahan dan Hambatan

Meskipun capaian program tergolong tinggi, DPPKB masih menghadapi sejumlah hambatan struktural dan kultural dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, di antaranya:

a. Masih adanya mindset "banyak anak banyak rezeki", yang menyebabkan sebagian masyarakat menolak Program Keluarga Berencana. Hal ini diperparah dengan:

- Anggapan bahwa KB bertentangan dengan nilai agama,
- Ketiadaan anggaran khusus untuk mendukung penghitungan TFR,
- Belum tersedia teknologi dan inovasi untuk penghitungan TFR dan ASFR,
- Belum dilakukan survei independen untuk data TFR, sehingga masih mengandalkan data Perhitungan Kebutuhan (PK) dari BKKBN.

b. Kebutuhan akan legalitas kelembagaan dan kebijakan pengendalian penduduk, disebabkan oleh:

- Terbatasnya SDM yang memahami substansi pengendalian penduduk,
- Minimnya anggaran penyusunan kebijakan,
- Sarana dan prasarana yang terbatas,
- Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi,
- Kurangnya keterlibatan perangkat daerah lintas sektor.

c. Masih terjadi kegagalan dalam pemasangan alat kontrasepsi modern (KB MKJP), yang berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat dan munculnya mitos negatif tentang KB, disebabkan oleh:

- Kurangnya tenaga medis yang bersertifikat pemasangan KB,
- Ketergantungan pada dana BOKB,
- Keterbatasan alat kontrasepsi (seperti laparoskopi) di rumah sakit,
- Masalah akurasi dan validasi data PUS dan akseptor.

d. Masih tingginya angka perkawinan perempuan di bawah usia 19 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang Pernikahan dan kebijakan BKKBN yang menganjurkan usia kawin minimal 21 tahun. Penyebabnya meliputi:

- Minimnya pengetahuan remaja tentang dampak pernikahan dini,
- Tidak tersedianya anggaran khusus untuk program pencegahan perkawinan anak,
- Metode KIE yang belum maksimal,
- Faktor ekonomi sebagai pendorong utama.

3. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Daerah

Layanan DPPKB memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan Usia Harapan Hidup, yang merupakan bagian dari komponen Indeks Kesehatan. Hal ini secara langsung mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah, serta berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karawang.

4. Tantangan dan Peluang

Tantangan utama yang dihadapi DPPKB meliputi:

- Menjaga usia kawin pertama perempuan di atas 20 tahun,
- Meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi modern oleh seluruh Pasangan Usia Subur (PUS),
- Mengubah mindset masyarakat mengenai jumlah anak ideal.

Namun demikian, terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan, seperti dukungan kebijakan nasional, potensi kolaborasi dengan lintas sektor, serta pelaksanaan Program Quick Wins BKKBN, yang menjadi strategi percepatan dalam peningkatan kualitas keluarga.

5. Rekomendasi Tindak Lanjut

a. Mengubah mindset "banyak anak banyak rezeki"

- Memaksimalkan kegiatan KIE melalui peran kader, tokoh agama, dan tokoh masyarakat,
- Memanfaatkan spreadsheet dan perhitungan TFR secara digital,
- Mengusulkan pelaksanaan survei TFR lokal tahun 2025.

b. Kebutuhan akan legalitas kelembagaan pengendalian penduduk

- Optimalisasi SDM dan kerja sama dengan perguruan tinggi,
- Penyusunan kebijakan berbasis data dan SK tim pengendalian penduduk.

c. Meningkatkan keberhasilan pemasangan KB Modern

- Pelatihan tenaga medis dan kerja sama dengan RS pemerintah/swasta,
- Penganggaran pelayanan KB MKJP melalui APBD,
- Validasi data akseptor dan penyelarasan penginputan data PUS.

d. Pencegahan perkawinan usia anak

- KIE secara langsung dan digital, termasuk di sekolah dan komunitas remaja,
- Sinergi program dengan kegiatan remaja lainnya,
- Mendorong pemanfaatan anggaran untuk mendukung IKU/IKK yang relevan.

6. Integrasi Program Quick Wins BKKBN

Sebagai bagian dari penguatan pelaksanaan tugas, DPPKB juga perlu mengintegrasikan Program Quick Wins BKKBN ke dalam kegiatan prioritas daerah, antara lain:

- Gerakan Lanjut Usia Berdaya: Pemberdayaan lansia melalui edukasi kesehatan dan peran dalam keluarga.
- Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting: Mendorong partisipasi keluarga dan masyarakat dalam mendukung anak-anak berisiko stunting.
- Taman Asuh Sayang Anak: Menyediakan ruang belajar dan bermain yang sehat bagi balita untuk mendukung tumbuh kembang optimal.
- Gerakan Ayah Teladan Indonesia: Meningkatkan peran ayah dalam pengasuhan dan pembangunan keluarga berkualitas.

Integrasi program ini tidak hanya memperkuat pelaksanaan Program Bangga Kencana, tetapi juga mendukung pencapaian target nasional percepatan penurunan stunting dan pembangunan keluarga berkualitas.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai pedoman bagi

pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan / pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single codebase untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan.

Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang tercantum dalam RKPD dapat dilihat pada table 2.4.1

TABEL 2.4.1

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	Program Pengendalian Penduduk	Karawang	persentase kebijakan yang mengatur pengendalian penduduk	2	1.560.235.000	Program Pengendalian Penduduk	Karawang	persentase kebijakan yang mengatur pengendalian penduduk	2	1.554.259.700	
2	1 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Karawang	Jumlah Sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (Parameter dan Proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program Pembangunan berbasis kependudukan	30	830.785.000	1 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Karawang	Jumlah Sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (Parameter dan Proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program Pembangunan berbasis kependudukan	30	1.396.009.700	

3		1	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Karawang	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana))	2	482.360.000		1	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Karawang	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana))	2	888.937.200	Kegiatan Baru
4		2	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Karawang	Jumlah laporan sekolah yang melaksanakan kurikulum berbasis kependudukan melalui jalur pendidikan formal	5	100.000.000		2	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Karawang	Jumlah laporan sekolah yang melaksanakan kurikulum berbasis kependudukan melalui jalur pendidikan formal	5	146.400.000	Kegiatan Baru
5		3	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Karawang	Jumlah laporan keluarga yang menggambarkan delapan fungsi keluarga dalam upaya membangun kualitas keluarga	2	248.425.000		3	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Karawang	Jumlah laporan keluarga yang menggambarkan delapan fungsi keluarga dalam upaya membangun kualitas keluarga	2	360.672.500	Kegiatan Baru

6	2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Karawang	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro keluarga di setiap Desa	309	729.450.000	2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Karawang	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro keluarga di setiap Desa	309	729.450.000		
7		1	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Karawang	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	12	158.250.000		1	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Karawang	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	12	158.250.000	
8		2	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Karawang	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia	1	163.200.000		2	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Karawang	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia	1	163.200.000	
9		3	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Karawang	Jumlah dokumen pelaporan pengendalian lapangan dan Pelayanan KB	12	288.000.000		3	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Karawang	Jumlah dokumen pelaporan pengendalian lapangan dan Pelayanan KB	12	288.000.000	
10		4	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	Karawang	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12	120.000.000		4	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	Karawang	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12	120.000.000	Kegiatan Baru

11	Program Pembinaan Keluarga Berencana		Karawang	Angka Pemakaian Kontrasepsi / CPR Bagi Perempuan menikah Usia 15 - 49 Tahun)	6503	18.616.455.000	Program Pembinaan Keluarga Berencana		Karawang	Angka Pemakaian Kontrasepsi / CPR Bagi Perempuan menikah Usia 15 - 49 Tahun)	6503	18.616.455.000	
12	1	Pelaksanaan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Karawang	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	12	1.747.863.000	1	Pelaksanaan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Karawang	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	12	1.747.863.000	

13		1	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Karawang	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	30	157.863.000		1	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Karawang	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	30	207.863.200	
14		2	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Karawang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	12	1.020.000.000		2	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Karawang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	12	1.020.000.000	

15		3	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Karawang	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12	450.000.000		3	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Karawang	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12	450.000.000	
16		4	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Karawang	Jumlah laporan promosi dan KIE di media Massa baik cetak maupun elektronik	12	120.000.000		4	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Karawang	Jumlah laporan promosi dan KIE di media Massa baik cetak maupun elektronik	12	120.000.000	
17		5	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Karawang	Jumlah Stakeholder yang mendapatkan advokasi program Bangga Kencana	30	80.000.000		5	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Karawang	Jumlah Stakeholder yang mendapatkan advokasi program Bangga Kencana	30	80.000.000	

18	2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Karawang	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan daerah di bidang pengendalian penduduk	992	9.979.630.000	2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Karawang	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan daerah di bidang pengendalian penduduk	992	9.979.630.000	
19	1	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Karawang	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	992	9.774.730.000	1	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Karawang	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	992	6.539.743.200	

20		2	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyulu h Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Karawang	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyul uh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12	204.900.000		2	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Peny uluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Karawang	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Pen yuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12	153.999.400	
21	3		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Karawang	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk memenuhi Permintaan Masyarakat	137	4.348.212.000	3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Karawang	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk memenuhi Permintaan Masyarakat	137	4.348.212.000		

22	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Karawang	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12	275.730.000	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Karawang	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12	275.730.000	
23	2	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Karawang	Jumlah akseptor yang mendapatkan pelayanan KB MKJP	6503	4.072.482.000	2	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Karawang	Jumlah akseptor yang mendapatkan pelayanan KB MKJP	6503	4.072.482.000	
24	3	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Karawang	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1	50000000	3	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Karawang	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1	50000000	Kegiatan Baru

25		4	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Karawang	Jumlah Mitra yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	30	320200000		4	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Karawang	Jumlah Mitra yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	30	320200000	
26	4		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Karawang	Pemerintah Daerah Kabupaten Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang Efektif	30	2.540.750.000	4		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Karawang	Pemerintah Daerah Kabupaten Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang Efektif	30	2.540.750.000	

27		1	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Karawang	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	30	130.000.000		1	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Karawang	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	30	130.000.000	
28		2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Karawang	Jumlah stakeholder lintas sektor yang berperan serta aktif dalam pembangunan Kampung KB	30	3.750.000		2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Karawang	Jumlah stakeholder lintas sektor yang berperan serta aktif dalam pembangunan Kampung KB	30	3.750.000	

29		3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Karawang	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	205	2.407.000.000		3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Karawang	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	205	2.407.000.000	
30	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera			Karawang	Median Usia Kawin Pertama Wanita	21	13.516.611.000	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera			Karawang	Median Usia Kawin Pertama Wanita	21	13.516.611.000	
31	1		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Karawang	Cakupan Kelompok Kegiatan Yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 Fungsi Keluarga	205	891.021.000	1		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Karawang	Cakupan Kelompok Kegiatan Yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 Fungsi Keluarga	205	891.021.000	

32	1	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Karawang	Jumlah laporan hasil promosi dan sosialisasi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	12	300.221.000	1	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Karawang	Jumlah laporan hasil promosi dan sosialisasi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	12	300.221.000	
33	2	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Karawang	Jumlah PPKS yang terbentuk serta pembinaannya	3	28.800.000	2	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Karawang	Jumlah PPKS yang terbentuk serta pembinaannya	3	28.800.000	Kegiatan Baru
34	3	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Karawang	Jumlah laporan promosi dan sosialisasi Poktan dan UPPKA	12	160.000.000	3	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Karawang	Jumlah laporan promosi dan sosialisasi Poktan dan UPPKA	12	160.000.000	

35		4	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Karawang	Jumlah pengadaan barang bagi Poktan dan UPPKA	30	300.000.000		4	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Karawang	Jumlah pengadaan barang bagi Poktan dan UPPKA	30	300.000.000	
36		5	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga	Karawang	Jumlah Stakeholder dan lintas sektor yang terpapar program Ibangga	30	102.000.000		5	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga	Karawang	Jumlah Stakeholder dan lintas sektor yang terpapar program Ibangga	30	102.000.000	Kegiatan Baru
37	2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Karawang	Jumlah Stakeholder/Pem angku Kepentingan dan bermitrakerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan aktif dalam pengelolaan programKKBPK	30	12.625.590.000	2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Karawang	Jumlah Stakeholder/Pe mangku Kepentingan dan bermitrakerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan aktif dalam pengelolaan programKKBPK	30	12.625.590.000	

38		1	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Karawang	Jumlah laporan pembinaan peningkatan peran serta organisasi masyarakat dan mitra dalam pembinaan Poktan dan UPPKA	12	120.000.000		1	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Karawang	Jumlah laporan pembinaan peningkatan peran serta organisasi masyarakat dan mitra dalam pembinaan Poktan dan UPPKA	12	120.000.000	
39		2	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Karawang	Jumlah mitra kerja dan masyarakat yang ikut mensosialisasikan program Bangga Kencana	30	417.890.000		2	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Karawang	Jumlah mitra kerja dan masyarakat yang ikut mensosialisasikan program Bangga Kencana	30	417.890.000	
40		3	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Karawang	Jumlah dokumen laporan Keluarga Berisiko Stunting oleh tim TPPS	2	250.000.000		3	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Karawang	Jumlah dokumen laporan Keluarga Berisiko Stunting oleh tim TPPS	2	250.000.000	Kegiatan Baru

41		4	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Karawang	Jumlah laporan hasil pendampingan sasaran bagi Keluarga Berisiko Stunting oleh TPK	5637	11.837.700.000		4	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Karawang	Jumlah laporan hasil pendampingan sasaran bagi Keluarga Berisiko Stunting oleh TPK	5637	11.837.700.000	Kegiatan Baru
42	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Karawang	Pereentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah	100	11.864.996.702	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Karawang	Pereentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah	100	11.864.996.702	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			karawang	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	30 unit	1.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			karawang	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	30 unit	1.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			karawng	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 orang	1.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			karawng	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 orang	1.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			karawang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12	1.000.000.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			karawang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12	1.000.000	

43	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Karawang	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	58.715.000	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Karawang	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	58.715.000	
	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Karawang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	1.000.000	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Karawang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	1.000.000	
44	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Karawang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	58.715.000	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Karawang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	58.715.000	

45	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Karawang	Persentase Dokumen Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	100	6.576.817.637	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Karawang	Persentase Dokumen Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	100	6.576.817.637	
46	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Karawang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18	0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Karawang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18	0	
47	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Karawang	Jumlah laporan akhir keuangan	1	10.500.000	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Karawang	Jumlah laporan akhir keuangan	1	10.500.000	Kegiatan Baru
48		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Karawang	Persentase dokumen Barang Milik Daerah pada SKPD	100	10.272.700		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Karawang	Persentase dokumen Barang Milik Daerah pada SKPD	100	10.272.700	
49	1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Karawang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	10.272.700	1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Karawang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	10.272.700	
50		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Karawang	Persentase Dokumen Laporan Administrasi Umum	100	681.266.000		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Karawang	Persentase Dokumen Laporan Administrasi Umum	100	681.266.000	

51	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listerik / Penerangan Bangunan Kantor	Karawang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	11.129.000	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listerik / Penerangan Bangunan Kantor	Karawang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	11.129.000	
		Pengadaan Mebel	karawang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	1.000.000		Pengadaan Mebel	karawang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	1.000.000	
52	2	Peneyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Karawang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	178.045.400	2	Peneyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Karawang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	178.045.400	
53	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Karawang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	31.968.000	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Karawang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	31.968.000	
54	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Karawang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	101.823.600	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Karawang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	101.823.600	
55	5	Penyediaan Bahan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Karawang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12	12.600.000	5	Penyediaan Bahan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Karawang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12	12.600.000	

56		6	Fasiliatsi Kunjungan Tamu	Karawang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2	45.700.000		6	Fasiliatsi Kunjungan Tamu	Karawang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2	45.700.000	
57		7	Penyelenggaraan Rapat Korrdinasi dan Konsultasi SKPD	Karawang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	300.000.000		7	Penyelenggaraa n Rapat Korrdinasi dan Konsultasi SKPD	Karawang	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	300.000.000	
58	4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Karawang	Persentase laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	100	750.000.000	4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Karawang	Persentase laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	100	750.000.000	
59		1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Karawang	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah	1	750.000.000		1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Karawang	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah	1	750.000.000	
60		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Karawang	Persentase laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	1.402.312.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Karawang	Persentase laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	1.402.312.000	
61			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Karawang	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	200.000.000			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Karawang	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	200.000.000	

62			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Karawang	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	18.280.000			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Karawang	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	18.280.000	
63			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Karawang	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	1.184.032.000			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Karawang	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	1.184.032.000	
64			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Karawang	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	2.338.163.250			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Karawang	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	2.338.163.250	
65			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Karawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	894.702.250			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Karawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	894.702.250	
66			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Karawang	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	1.443.461.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Karawang	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	1.443.461.000	

67		Penataan Organisasi		Karawang	Persentase Penataan Organisasi SKPD	100	47.450.115		Penataan Organisasi	Karawang	Persentase Penataan Organisasi SKPD	100	47.450.115		
68		1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Karawang	Jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2	47.450.115		1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Karawang	Jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2	47.450.115	Kegiatan Baru

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Upaya pengendalian pertumbuhan dan kuantitas penduduk perlu memperoleh perhatian serius sebab disamping jumlah pasangan usia subur yang terus meningkat, keberlanjutan program KB menjadi terancam karena kurang tertangani dengan serius. Disisi lain, penurunan angka kelahiran dan kematian yang cepat dimasa lalu mengundang permasalahan baru, yaitu terjadinya perubahan jumlah, struktur dan komposisi penduduk dengan cepat. Perubahan yang cepat itu perlu diimbangi dengan pengembangan kebijakan.

Pembangunan yang mempertimbangkan dinamika kependudukan agar program-program pembangunan selanjutnya lebih terarah dan terkendali. Masalahnya adalah bahwa jika penurunan laju pertumbuhan penduduk dapat terus ditingkatkan, maka dana yang ada akan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan berbagai sarana dan prasarana yang menunjang peningkatan mobilitas dan persebaran penduduk sehingga akan meningkatkan kualitas penduduk dengan persebaran yang lebih seimbang.

Wadah Program Pengendalian Penduduk ditingkat Desa atau Kelurahan yaitu melalui pemanfaatan Kampung Keluarga Berkualitas dan Rumah Dataku. Diharapkan dengan memaksimalkan fungsi dari Kampung Keluarga Berkualitas yang didanai dari BOKB dapat menjadikan salah satu solusi permasalahan yang ada di desa atau kelurahan. Begitupun dengan pembentukan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera atau Satyagatra di tingkatan Kecamatan (bertahap) bisa membantu perpanjangan tangan pemerintah terutama di Bidang Pemberdayaan keluarga dan Keluarga Berencana serta kesejahteraan keluarga.

Program dan Kegiatan yang di usulkan oleh masyarakat baik melalui musrenbang ataupun melalui minggon Kecamatan ataupun minggon desa dapat di lihat pada table 2.5.1

Tabel 2.5.1
Usulan Program dan kegiatan dan Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Nihil	0	0	0	0
2					
3					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, ditetapkan bahwa pimpinan Kementerian/Lembaga menyusun perencanaan strategis dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sejalan dengan hal tersebut, Quick Wins BKKBN disusun sebagai bentuk percepatan pencapaian target prioritas nasional dalam pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.

Quick Wins ini meliputi perencanaan program dan kegiatan strategis serta penguatan tata kelola, yang disusun berdasarkan sistem perencanaan anggaran berbasis kinerja, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), dan prinsip anggaran terpadu (*Unified Budgeting*). Dalam implementasinya, BKKBN juga menggunakan instrumen pengelolaan kinerja seperti *Balanced Scorecard* (BSC) sebagai kerangka integrasi antara strategi dan operasional, serta penguatan kelembagaan hasil dari restrukturisasi peran dan fungsi.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, peran BKKBN tidak lagi terbatas pada pelaksanaan Program Keluarga Berencana saja, tetapi mencakup penyerasian kebijakan pengendalian penduduk secara nasional. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang menetapkan peran koordinatif lintas sektor dan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga.

Pembangunan kependudukan merupakan program lintas sektor yang menuntut adanya penyerasian kebijakan antar bidang dan antar lembaga, terutama dalam penyediaan dan peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan. Ketidadaan lembaga khusus yang mengelola penyerasian kebijakan menyebabkan terjadinya tumpang tindih atau bahkan pertentangan antara program sektoral.

Untuk mendukung percepatan sasaran pembangunan SDM berkualitas dan pencapaian NRR=1, maka Quick Wins BKKBN diarahkan pada tiga isu strategis utama:

1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan, melalui:
 - Pemanfaatan bonus demografi;
 - Pengelolaan penduduk lansia (aging population);
 - Pendekatan siklus hidup berbasis perencanaan kehidupan berkeluarga;
 - Penguatan sistem Satu Data Kependudukan.
2. Pemenuhan Layanan Dasar, dengan fokus pada:
 - Penurunan angka kematian ibu dan bayi;
 - Peningkatan kembali penggunaan kontrasepsi modern;
 - Penguatan edukasi remaja tentang kesehatan reproduksi dan perencanaan kehidupan berkeluarga;

- Penurunan angka unmet need KB yang masih tinggi;
- Pencegahan dan penurunan prevalensi stunting secara terpadu.
- 3. Pembangunan Kebudayaan dan Karakter Bangsa, yang diarahkan pada:
 - Peningkatan pemahaman keluarga tentang delapan fungsi keluarga;
 - Pencegahan pernikahan usia anak melalui pendekatan edukatif dan regulatif.

Melalui pelaksanaan Quick Wins BKKBN tersebut, diharapkan seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dapat bergerak secara sinergis dalam mendukung pembangunan keluarga berkualitas dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Tingkat Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Program Prioritas Nasional Tahun 2026

No	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Kabupaten Karawang Tahun 2026	Prioritas Nasional Yang di dukung	Program Prioritas/Porgram Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2026	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Prioritas Nasional 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Prioritas Pembangunan 1 Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing		Program pengendalian penduduk	TFR	Usia	2,00	Rp.1.366.102.200	DPPKB
2	Prioritas Nasional 4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Prioritas Pembangunan 1 Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing		Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Mcpr dan UnmetNeed	%	70	RP.9.074.075.800	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Kabupaten Karawang Tahun 2026	Prioritas Nasional Yang di dukung	Program Prioritas/Pogram Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2026	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Prioritas Nasional 6 Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Prioritas Pembangunan 1 Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing		Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Yang mengikuti kegiatan ketahanan keluarga	Persentase	70	1.275.176.200	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja

Sebagaimana tertera sebelumnya seluruh sasaran tersebut di atas di rumuskan guna mencapai Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2021 – 2026. Agar upaya pencapaian Visi, Misi dan Program prioritas tersebut terukur, maka Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana menggunakan indikator dampak “Laju Pertumbuhan Penduduk”. Laju Pertumbuhan Penduduk merupakan indikator yang upaya pencapaiannya harus secara komprehensif dengan baik. Laju Pertumbuhan Penduduk sendiri di pengaruhi paktor kelahiran, kematian dan migrasi. Mengingat Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang di atur berdasarkan Peraturan Bupati Karawang no 54 Tahun 2016 maka sebagai upaya untuk menekan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Karawang dengan menekan Angka Kelahiran Total. Angka Kelahiran Total atau Total Fertility Rate yang sering disingkat TFR adalah jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa usia suburnya (antara umur 15-49 tahun). Indikator ini penting dan strategis untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu daerah ataupun seluruh negara dalam mengendalikan jumlah penduduknya. Angka Kelahiran Total (TFR) banyak di pengaruhi beberapa hal antara lain :

1. Rendahnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi modern (mCPR) terutama MKJP
2. Masih Tingginya Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi / Unmet need
3. Rendahnya Median Usia Kawin pertama (MUKP)

Indikator kinerja tersebut yang di jadikan tolak ukur berhasil dan tidaknya kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang sebagai komitmen pencapaian tujuan dan sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Karawang tahun 2023

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Visi Kabupaten Karawang “ **MEWUJUDKAN KARAWANG MAJU, BERDAYA SAING TINGGI DAN BERKELANJUTAN** ” dan misi serta tujuannya yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka Program

Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana termasuk pada misi Pertama yakni Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Dasar pertimbangan penetapan program dan kegiatan prioritas adalah

1. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan / pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single codebase untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan.
2. Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkup Kabupaten Karawang Tahun 2021 – 2026
3. Peraturan Bupati Karawang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang.

Jumlah Program dan Kegiatan Strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang di Tahun 2025 berjumlah

- | | |
|-----------------|-------------------|
| a. Program | : 4 Program |
| b. Kegiatan | : 15 Kegiatan |
| c. Sub kegiatan | : 48 Sub kegiatan |

Adapun kebutuhan dana untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis adalah sebesar 46,008,497,702 (Empat Puluh Enam Milyar Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah) Uraian tentang pagu anggaran pada tiap kegiatan dapat di lihat pada table 3.3.1

Rancangan Kebutuhan Awal RKPD mengacu kepada kegiatan tahun 2024, sedangkan perubahan anggaran yang bersumber dari dana bantuan operasional KB pada umumnya terjadi perubahan (penambahan/pengurangan pagu) terjadi pada semester 2. Jadi rancangan RKPD ini masih bersifat sementara terutama terkait program dan kegiatan yang biasanya terdapat kegiatan prioritas dari Provinsi dan Pusat. Final Pagub isa dipastikan Ketika penginputan anggaran di akhir tahun dan sudah di Proyeksikan untuk kegiatan dan program

penunjang apa saja yang menjadi prioritas. Jadi Kegiatan maupun sub kegiatan bisa saja terjadi perubahan di akhir tahun penetapan anggaran.

TABEL 3.3.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja 2025	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	14	15	16
						Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			20.398.818.702,00					0,00
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			20.398.818.702,00					0,00
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			20.398.818.702,00					0,00
1	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	10.270.248.402,00				-	0,00
	2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi penganggaran	10 Dokumen	205.989.600,00			Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	-	0,00
	2	14	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								

						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	205.989.600,00	Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB		0,00	
	2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan program urusan pemerintah	2 Dokumen	6.576.479.202,00			Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	-	0,00
	2	14	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	6.566.321.202,00	Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB		0,00	
	2	14	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.158.000,00	Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB		0,00	
	2	14	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi Barang Milik Daerah	2 Dokumen	10.354.000,00			Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	-	0,00
	2	14	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	10.354.000,00	Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB		0,00	

	2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan dokumen administrasi umum	2 dokumen	1.136.154.600,00			Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	-	0,00
	2	14	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.153.000,00	Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB		0,00
	2	14	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	580.485.600,00	Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB		0,00
	2	14	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	31.625.000,00	Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB		0,00
	2	14	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	154.571.000,00	Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB		0,00
	2	14	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12.600.000,00	Kab. Karawang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB		0,00

										Semua Kel/Desa				
	2	14	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	45.716.000,00	Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB		0,00
	2	14	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	300.004.000,00	Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB		0,00
	2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah laporan pengadaan Barang milik daerah	1 Dokumen	600.000.000,00			Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	-	0,00
	2	14	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	600.000.000,00	Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB- PENUGASAN- KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB		0,00
	2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang	12 Dokumen	844.384.000,00			Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	-	0,00
	2	14	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	278.950.000,00	Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB		0,00
	2	14	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	30.050.000,00	Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB		0,00
	2	14	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	535.384.000,00	Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB		0,00
	2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	896.887.000,00			-	-	0,00
	2	14	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	896.887.000,00	Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00
	2	14	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	0,00	Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-KELUARGA BERENCANA	-		0,00
2	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-	1.554.259.700,00				-	0,00
	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) serta Kerjasama Kependudukan jalur pendidikan formal	3 Dokumen	1.396.009.700,00			Stakeholder dan Masyarakat pada umumnya	-	0,00
	2	14	02	2.01	0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	3 Dokumen	888.937.200,00	Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Stakeholder dan Masyarakat pada umumnya		0,00
	2	14	02	2.01	0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal								

						Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	4 Kegiatan	146.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Stakeholder dan Masyarakat pada umumnya		0,00	
	2	14	02	2.01	0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana								
						Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	6 Kegiatan	360.672.500,00	Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Stakeholder dan Masyarakat pada umumnya		0,00	
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan yang dilaporkan	100 Persen	158.250.000,00			Seluruh Kepala Dinas, Kecamatan serta Masyarakat pada umumnya	-	0,00
	2	14	02	2.02	0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan								
						Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	30 Dokumen	158.250.000,00	Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Seluruh Kepala Dinas, Kecamatan serta Masyarakat pada umumnya		0,00	
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga								
						Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	0,00	Kab. Karawang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Seluruh Kepala Dinas, Kecamatan serta Masyarakat pada umumnya		0,00	

										Semua Kel/Desa				
	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB								
							Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	0,00	Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB- KB	Seluruh Kepala Dinas, Kecamatan serta Masyarakat pada umumnya		0,00
3	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	-	7.299.134.400,00				-	0,00
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Mitra Kerja yang Teradvokasi program Bangga Kencana	10 Mitra	207.863.200,00			Stakeholder dan Masyarakat pada umumnya	-	0,00
	2	14	03	2.01	0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana								
							Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	24 Unit	207.863.200,00	Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Stakeholder dan Masyarakat pada umumnya		0,00
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana								

						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	0,00	Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Stakeholder dan Masyarakat pada umumnya		0,00
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)							
						Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	30 Laporan	0,00	Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Stakeholder dan Masyarakat pada umumnya		0,00
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang							
						Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	12 Dokumen	0,00	Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Stakeholder dan Masyarakat pada umumnya		0,00
	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja							

						Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	30 Organisasi	0,00	Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Stakeholder dan Masyarakat pada umumnya		0,00	
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah dokumen hasil pendayagunaan Penyuluh KB	100 Persen	6.539.743.200,00			Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB	-	0,00
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)								
						Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1388 Orang	6.385.743.800,00	Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB		0,00	
	2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)								
						Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12 Laporan	153.999.400,00	Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB		0,00	

	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100 Persen	417.947.100,00			Stakeholder dan Masyarakat pada umumnya	-	0,00
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya								
						Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	0,00		Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Stakeholder dan Masyarakat pada umumnya		0,00
	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	6503 Orang	239.560.000,00		Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	Stakeholder dan Masyarakat pada umumnya		0,00
	2	14	03	2.03	0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP								
						Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	5 Laporan	0,00		Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Stakeholder dan Masyarakat pada umumnya		0,00
	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya								

						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	178.387.100,00	Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	Stakeholder dan Masyarakat pada umumnya		0,00	
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah laporan hasil pemberdayaan masyarakat	2 Dokumen	133.580.900,00			Seluruh Kepala Dinas, Kecamatan serta Masyarakat pada umumnya	-	0,00
	2	14	03	2.04	0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB								
						Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	4 Organisasi	133.580.900,00	Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Seluruh Kepala Dinas, Kecamatan serta Masyarakat pada umumnya		0,00	
	2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB								
						Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	0,00	Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Seluruh Kepala Dinas, Kecamatan serta Masyarakat pada umumnya		0,00	
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas								

						Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	205 Kampung	0,00	Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Seluruh Kepala Dinas, Kecamatan serta Masyarakat pada umumnya		0,00	
4	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-	1.275.176.200,00			-	0,00	
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	jumlah laporan pembinaan Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	2 Dokumen	727.482.400,00			Kelompok BKB, BKL, BKR, PIKR, UPPKA	-	0,00
	2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)								
						Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	12 Laporan	561.907.500,00	Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelompok BKB, BKL, BKR, PIKR, UPPKA		0,00	
	2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)								

						Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	12 Laporan / Dokumen	0,00	Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Kelompok BKB, BKL, BKR, PIKR, UPPKA		0,00
	2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))							
						Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 Laporan	99.999.900,00	Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelompok BKB, BKL, BKR, PIKR, UPPKA		0,00
	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))							
						Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	25 Unit	0,00	Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Kelompok BKB, BKL, BKR, PIKR, UPPKA		0,00
	2	14	04	2.01	0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)							
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	30 Orang	65.575.000,00	Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelompok BKB, BKL, BKR, PIKR, UPPKA		0,00

	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi Masyarakat yang ikut peran serta program Kependudukan	10 Mitra	547.693.800,00			Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	0,00
	2	14	04	2.02	0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)								
						Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	30 Organisasi	126.504.200,00	Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0,00	
	2	14	04	2.02	0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja								
						Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	12 Laporan	421.189.600,00	Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0,00	
	2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)								

						Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	12 laporan	0,00	Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0,00
	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)							
						Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	12 laporan	0,00	Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0,00
								J U M L A H	20.398.818.702,00				0,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Visi Pembangunan Kabupaten Karawang Tahun 2021–2026 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021–2026 adalah “Mewujudkan Karawang Maju, Berdaya Saing Tinggi dan Berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang kreatif, produktif, dan berdaya saing serta berbasis pada potensi lokal.
3. Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang aman, nyaman, dan mendukung proses pembangunan yang berkesinambungan.
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Selaras dengan misi pembangunan daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karawang menetapkan lima program prioritas pembangunan daerah Tahun 2021–2026, yaitu:

1. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta pengembangan ekonomi kreatif.
3. Perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan peningkatan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
5. Penguatan infrastruktur penunjang untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah serta program prioritas kepala daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Karawang menyusun arah kebijakan dan rencana kerja tahunan berbasis pada strategi nasional dan lokal, yang meliputi:

1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan, yang mencakup:
 - o Pemanfaatan bonus demografi secara optimal;
 - o Pengelolaan penduduk lanjut usia (*aging population*);
 - o Pendekatan siklus hidup melalui perencanaan kehidupan berkeluarga;
 - o Penguatan sistem *Satu Data Kependudukan* yang terintegrasi dan berbasis digital.
2. Pemenuhan Layanan Dasar, melalui:
 - o Pencegahan angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi, melalui kampanye Program *4 Terlalu* (Terlalu Muda, Terlalu Dekat, Terlalu Banyak, dan Terlalu Tua);
 - o Peningkatan penggunaan alat dan metode kontrasepsi modern;
 - o Edukasi remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - o Penurunan angka unmet need (kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi) pada pasangan usia subur;
 - o Penurunan angka prevalensi stunting serta pencegahan *zero new stunting*.
3. Pembangunan Kebudayaan dan Karakter Bangsa, melalui:
 - o Peningkatan pemahaman keluarga terhadap peran dan delapan fungsi keluarga;
 - o Pencegahan dan penurunan angka pernikahan usia anak, khususnya di wilayah-wilayah yang berisiko tinggi.
4. Pendanaan dan Dukungan Anggaran, yang bersumber dari:

- o Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Kabupaten Karawang;
- o Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non-Fisik berupa Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), yang mendukung kegiatan operasional lapangan dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan KB.

Keseluruhan arah kebijakan dan strategi ini ditujukan untuk mendukung **terciptanya keluarga berkualitas dan penduduk yang terkendali**, serta memperkuat kontribusi DPPKB terhadap capaian prioritas pembangunan sumber daya manusia, penguatan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Karawang secara berkelanjutan.

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang telah melakukan *desk* perencanaan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat. Melalui kegiatan koordinasi tersebut, diperoleh informasi mengenai sejumlah kegiatan wajib yang menjadi prioritas pemerintah provinsi dan nasional, namun belum seluruhnya dapat terakomodir pada perencanaan anggaran tahun 2025.

Sebagai bentuk penyesuaian dan respons terhadap hasil sinkronisasi program lintas sektoral dan lintas jenjang pemerintahan, maka kegiatan-kegiatan tersebut diusulkan dan diakomodir pada perencanaan program dan anggaran tahun 2026, sesuai dengan arahan dan prioritas pembangunan daerah serta memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kesinambungan program.

Kegiatan yang diwajibkan ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021–2026 serta mendukung pencapaian indikator kinerja prioritas daerah dan nasional, khususnya dalam aspek pengendalian penduduk, pelayanan KB, pencegahan stunting, serta peningkatan kualitas keluarga dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun rincian kegiatan tersebut ditampilkan pada tabel kegiatan prioritas hasil desk Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

No	Hasil Verifikasi Rancangan Renja 2026	Sudah Diakomodir dalam Rincian SubKegiatan di SIPD	Belum diakomodir dalam Rincian Subkegiatan di SIPD
1.	Pembentukan Kelompok Kegiatan Baru (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKA)	Sudah diakomodir di SIPD	
2.	Program Dapur sehat atasi stunting (DAHSAT) di Kampung KB	Sudah diakomodir di SIPD	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang Tahun 2026 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan, program, dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2021–2026.

Penyusunan Renja ini mengacu pada berbagai kebijakan nasional dan daerah, termasuk hasil sinkronisasi program melalui desk dengan Bappeda Provinsi Jawa Barat, serta memperhatikan isu-isu strategis pembangunan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Dokumen ini juga telah mengintegrasikan pendekatan berbasis siklus hidup, pemanfaatan bonus demografi, penguatan tata kelola data kependudukan, serta upaya percepatan penurunan stunting dan peningkatan ketahanan keluarga.

Diharapkan dengan adanya Renja ini, pelaksanaan program dan kegiatan DPPKB Tahun 2026 dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan selaras dengan visi pembangunan daerah, yaitu *"Mewujudkan Karawang Maju, Berdaya Saing Tinggi, dan Berkelanjutan."* Selain itu, dokumen ini juga menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam mengajukan usulan program/kegiatan, penganggaran, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.

Demikian Rencana Kerja ini disusun, semoga dapat menjadi pedoman operasional dalam penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Karawang.

Karawang, 27 Agustus 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KARAWANG



HJ. SOHAH, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19650820 198603 2 010